

Evaluasi Kebijakan Kerjasama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai

Irvan¹, Sujianto², Hasim As'ari³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Riau, Indonesia
e-mail: van.irvan76@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kebijakan terkait pengoperasian Bandar Udara melalui Kerja Sama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelita Air Service. Namun saat ini pengoperasiannya belum sesuai dengan yang diharapkan karena pemanfaatan sarana prasarana yang ada masih belum optimal dan kontribusi terhadap penerimaan daerah belum signifikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan kerjasama operasional pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai dan apa yang menjadi faktor penghambat dari pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai. Adapun pendekatan metode penelitian secara kualitatif yaitu dilakukan melalui tahapan mereduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi data. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kerjasama operasi pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai belum maksimal, dimana Bandar Udara belum didukung SDM yang memadai, sarana dan fasilitas Bandar Udara saat ini hanya mampu melayani jenis pesawat berbadan kecil (*narrow body*) dan kontribusi terhadap penerimaan daerah belum signifikan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai ini meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan status kepemilikan aset Bandar Udara Pinang Kampai. Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai dapat untuk dipertahankan dengan syarat sarana prasarana, fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan harus di benahi, atau alternatif lain aset Bandar Udara dihibahkan/ diserahkan kepada Pemerintah pusat/ daerah atau suatu organisasi profesional yang khusus mengelola Bandar Udara.

Kata kunci: Kebijakan, Evaluasi, Bandar Udara

Abstract

This research is motivated by a policy related to the operation of the airport through the Operational Cooperation for the Operation of Pinang Kampai Airport between the Dumai City Government and PT. Pelita Air Service. However, the current operation is not as expected because the utilization of existing facilities and infrastructure is still not optimal and the contribution to regional revenue is not significant. The purpose of this research is to evaluate the operational cooperation policy for the operation of the Pinang Kampai Airport in Dumai City and what are the inhibiting factors of the operation of Pinang Kampai Airport. The research method approach is qualitative, which is carried out through the stages of data reduction, data presentation or display and conclusions or data verification. To obtain representative data, both primary and secondary data, the researcher used several data collection techniques which included interviews, observations, documentations and literature reviews. The results of the policy evaluation research indicate that the operational cooperation of Pinang Kampai Airport has not been maximized, where the airport has not been supported by adequate human resources, the airport's facilities are currently only able to serve narrow-body aircraft and the contribution to regional revenue is not significant.

Meanwhile, the inhibiting factors of the operation of Pinang Kampai Airport include: Human Resources (HR), facilities and infrastructure, and asset ownership status of Pinang Kampai Airport. The operation of Pinang Kampai Airport can be maintained on condition that the facilities and infrastructure, aviation security and safety facilities must be improved, or alternatively the airport assets are granted/handed over to the central/regional government or a professional organization that specifically manages airports.

Keywords : *Policy, Evaluation, Airport*

PENDAHULUAN

Bandar Udara Pinang Kampai merupakan Bandar Udara Khusus yang dapat melayani penerbangan umum mulai dibangun pada tahun 1975 oleh PT. Pertamina, namun baru dilakukan renovasi bangunan terminal, perbaikan fasilitas ruang tunggu (*boarding lounge*) dan perluasan *apron* pada tahun 2019 dengan pembiayaan dari PT. Pertamina (Persero) selaku pemilik aset yang sejak tahun 2017 memberi penugasan untuk mengelola aset dimaksud kepada PT. Pelita Air Service selaku anak perusahaannya.

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor : KM 28 tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 Bandara Pinang Kampai telah ditingkatkan statusnya sementara menjadi Bandar Udara khusus yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum, sehingga dapat dioperasikan dan di kembangkan secara optimal.

Sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana maka dipandang perlu Pemerintah Kota Dumai melakukan suatu kebijakan terkait pengoperasian Bandar Udara dimaksud melalui Kerja Sama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelita Air Service sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSO No. 046.1 /K/PRESDIR/PAS/2017, No. 32/DISHUB/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Adendum No. 1 Kerja Sama Operasional No. 046.1 /K/PRESDIR/PAS/2017, No. 415.4/KS/ADENDUM/2021/027 tanggal 26 Maret 2021.

Dalam perjanjian Kerjasama Operasional dimaksud, PT. Pelita Air Service akan memberikan penggantian atas biaya/ kompensasi per tahun kepada Pemerintah Kota Dumai. Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui Satuan Pelaksana Bandar Udara melakukan pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai sesuai dengan kepemilikan Sertifikat Bandar Udara Nomor 061/SBU – DBU/XI/2020 yang berlaku hingga 20 November 2025.

Tabel 1. Data fasilitas Bandar Udara di dalam lingkungan kerja Bandar Udara

No	Fasilitas	Dimensi/Kapasitas/Jumlah	Keterangan
1.	Runway	1800 m x 30 m	Aspalt
2.	Apron	160 m x 70 m	Aspalt
3.	Taxiway	100 m x 23 m	Aspalt
4.	Gedung Terminal Keberangkatan	228 m x 430 m	
5.	Gedung Terminal Kedatangan	228 m x 116 m	
6.	Hanggar	30 m x 15 m	
7.	Tower	10 m x 6 m	

Sumber : *Bandar Udara Pinang Kampai Dumai, 2021*

Terminal Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai ruang *Check – in*, kantin, ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan berkapasitas \pm 300 orang yang baru selesai dilakukan renovasi pada tahun 2020 merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian pihak pemilik aset terhadap kemajuan transportasi udara di Kota Dumai. Tetapi sayangnya sampai saat ini operasional Bandar Udara Pinang Kampai belum dapat maksimal perannya dalam melayani penerbangan, sehingga fasilitas di Bandar Udara Pinang Kampai yang ada tersebut tidak efektif pemanfaatannya.

Dilihat dari kondisi ruang tunggu yang ada di Bandar Udara Pinang Kampai seharusnya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dengan melayani pesawat yang lebih besar kapasitas penumpangnya (*wide body*) dengan melayani rute penerbangan langsung dari dan ke kota besar yang ada di Indonesia. Bandar Udara Pinang Kampai bukan hanya dapat menampung masyarakat Dumai saja, namun juga dapat memberikan akses kepada masyarakat di sekitar Dumai seperti Duri, Bagan Batu, Rokan Hilir dan Bengkalis yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara.

Bandar Udara Pinang Kampai yang sudah dilakukan perluasan dengan lebar *apron* semula 70 x 100 meter menjadi 70 x 140 meter dengan panjang landasan 1,850 X 30 meter yang dapat menampung 6 (enam) jenis pesawat ATR seri 500/600 dan CRJ – 1000 dan sejenisnya, namun tidak diikuti dengan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu (*runway*) dengan panjang landasan menjadi 2,500 X 45 meter serta tidak merekonstruksi Alat Bantu Visual seperti *Air Field Lighting* dan *VASI Runway* 03 dan 21. Pada saat ini Bandar Udara Pinang Kampai eksis melayani penerbangan *fix wing* maupun *rotary wing* seperti ATR 72/ 500 milik PT. Pelita Air Service, ATR 72 milik PT. Wings Abadi Airlines dan Helicopter Bell 402 carteran pribadi atau untuk misi sosial dan kemanusiaan.

Pemerintah daerah Kota Dumai selaku pihak yang mengoperasikan tidak dapat memanfaatkan Bandar Udara secara maksimal dengan kondisi landasan pacu (*runway*), fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan dan fasilitas penunjang lainnya yang masih terbatas sehingga pesawat lebih besar (*wide body*) seperti jenis *Boeing* atau *Airbus* tidak dapat mendarat di Bandar Udara Pinang Kampai sehingga berdampak juga pada penerimaan (*income*) Bandar Udara itu sendiri.

Dengan fenomena-fenomena yang ada di Bandar Udara Pinang Kampai maka diperlukan sebuah evaluasi kebijakan untuk melihat langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan membantu Bandar Udara Pinang Kampai tersebut agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan kondisi eksisting saat ini dengan hasil yang diharapkan belum maksimal, maka dari itu sebuah evaluasi sangat bermanfaat agar kerjasama operasional dapat digunakan kembali untuk kemajuan daerah serta peningkatan pendapatan daerah. Stufflebeam dalam Arikunto (2004) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu melihat dan memahami suatu fenomena yang dialami dari suatu subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, perilaku, motivasi dan lainnya secara holistic, dan dengan cara deskriptif yaitu dengan digambarkan atau dijelaskan dengan bentuk kata-kata atau bahasa dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Lokasi penelitian adalah Bandar Udara Pinang Kampai yang merupakan Satuan Pelaksana Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dengan ruang lingkup penelitian yaitu Pemerintah Kota Dumai, meliputi pada Dinas/Instansi/Lembaga yang terkait langsung pada urusan tentang kebijakan kerjasama operasional pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelita Air Services. Informan penelitian ini adalah informan kunci yaitu orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan teknik *Sampling Purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan adalah (1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, (2) Kepala bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Dumai, (3) Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai, (4) Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Dumai, (5) Stasion Manager PT. Pelita Air Services Dumai, (6) Pegawai Satuan Pelaksana Bandar Udara sebagai tenaga operasional di Bandar Udara Pinang Kampai.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah (1) wawancara dilakukan secara langsung tatap muka (*face to face*) kepada nara sumber/ informan untuk menggali data secara mendalam tentang pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian dan yang telah terkonsep sesuai pedoman wawancara, (2) observasi merupakan teknik

pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengumpulan data langsung di lapangan atau pengamatan secara langsung ke objek penelitian yaitu Bandar Udara Pinang Kampai Dumai untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, (3) dokumentasi digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang dianggap valid karena obyek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada, (4) studi perpustakaan dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaahan referensi, baik yang bersumber dari buku, jurnal, koran, berita, dan sumber yang berkaitan dengan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai. Sedangkan proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi menjadi salah satu upaya yang diterapkan pemerintah untuk melihat permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kembali kebijakan yang mungkin harus dilakukan. Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai, mengingat kebijakan yang dilaksanakan belum sesuai dengan harapan.

Untuk dapat menilai sebuah evaluasi kebijakan yang baik maka diperlukan sebuah tipe evaluasi yang mampu membantu pengevaluasian terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga evaluasi tersebut dapat melihat dari berbagai aspek yang berkemungkinan menjadi faktor penghambat kebijakan tersebut. Adapun tipe evaluasi kebijakan menurut Nurcholis (2009) yaitu :

Evaluasi Kecocokan (*appropriateness*)

Evaluasi kecocokan, yaitu melakukan sebuah penilaian apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut cocok untuk dipertahankan, perlu digantikan dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan itu cocok dilakukan oleh pemerintah daerah bukan oleh swasta. Pemerintah Kota Dumai melakukan kerjasama operasional dalam rangka pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampa ini guna menjadikan Bandar Udara sebagai salah satu pembuka isolasi daerah dan pengembangan daerah dimana Kota Dumai juga merupakan akses masuknya moda transportasi darat dari ibu kota Provinsi Riau dan juga Provinsi Sumatera Utara, maka dari itu keberadaan Bandar Udara ini sangat strategis jika dilihat dari perannya dalam membuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana, serta mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

kebijakan kerjasama operasional terkait pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai yang dilakukan sudah cocok karena sudah sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan yang ada pada Dinas Perhubungan itu sendiri yaitu meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan Daerah, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. Sepanjang ini pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan mampu mengoperasikannya dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi terkait sarana prasarana yang ada sehingga pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai dapat maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan awal kerjasama dimaksud.

Evaluasi Efektivitas

Efektivitas yaitu suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan, penilaian apakah kebijakan yang dilakukan tersebut telah memberikan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuannya. Kebijakan Kerja Sama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelita Air Service dilihat dari hasil yang diperoleh belum efektif, hal ini dapat dilihat kurang maksimalnya pemanfaatan gedung terminal Bandar Udara guna memberikan tambahan bagi penerimaan jasa Bandar Udara dikarenakan kondisi panjang *runway* Bandar Udara Pinang Kampai hanya 1.800 x 30 m yang belum dapat melayani pesawat berbadan besar (*wide body*) guna memberikan pelayanan penerbangan yang dapat melayani penerbangan langsung ke kota – kota besar di Indonesia yang mayoritas diinginkan

masyarakat (penumpang), sehingga dapat memberikan nilai yang signifikan terhadap kerjasama operasional Bandar Udara itu sendiri.

Tabel 2. Komparasi Kapasitas Pesawat Berdasarkan Rute Penerbangan Eksisting Di Bandar Udara Pinang Kampai

No	Kapasitas Pesawat		Ferkuensi/Minggu	Jumlah Seat/ Minggu		Rute	Operator
	ATR 72 (Seat)	AIRBUS A320/BOEIN G 737 800 (Seat)		ATR 72 (Seat)	AIRBUS A320/BOEIN G 737 800 (Seat)		
1	52	124	3 X	156	372	Halim/ Jkt	PT. PAS
2	72	186	7 X	504	1.302	Medan	PT. WAA
3	72	186	7 X	504	1.302	Pekanbaru	PT. WAA
4	72	186	7 X	504	1.302	Batam	PT. WAA
Total Seat/ Minggu				1.668	4.278		

Sumber : Bandar Udara Pinang Kampai Dumai, 2021

Dilihat dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dengan keterbatasan panjang *runway* yang hanya dapat melayani pesawat kecil (*narrow body*) dapat berdampak terhadap indeks penumpang yang menggunakan jasa pelayanan Bandar Udara Pinang Kampai. Perhatian bersama terkhususnya pihak yang terkait dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya untuk memelihara dan pengembangan sarana dan prasana Bandar Udara Pinang Kampai tentunya akan membawa nilai positif bagi kedua belah pihak dan masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

Evaluasi Efisiensi

Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya dan sumber dana yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), biaya, dan sarana prasarana yang telah diberikan dalam penerapan kebijakan Kerja Sama Operasional dalam rangka pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelita Air Service, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum efisien. Dapat diketahui bahwa *passenger service charge/ airport tax* di Bandar Udara Pinang Kampai per orang sebesar Rp. 17.000,- dan jika jenis pesawat yang dilayani saat ini hanya berbadan kecil (*narrow body*) tidak akan menutupi biaya operasional, memang masih ada biaya jasa lainnya seperti jasa pendaratan dan penempatan pesawat, namun biaya dimaksud juga tidak terlalu besar karena mengikuti bobot/ tonase pesawat yang dilayani.

Table 3. Perkiraan Jumlah Penerimaan *Passenger Service Charge* Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir Berdasarkan Jumlah Penumpang

Tahun	Penumpang (Orang) Berangkat	PSC/ Airport Tax (Rp)	Jumlah
2021	465	17.000,-	7.905.000,-
2020	14.168	17.000,-	240.856.000,-
2019	55.484	17.000,-	943.228.000,-

Sumber : Bandar Udara Pinang Kampai Dumai, 2022

Dari tabel diatas terlihat 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, namun masih dapat dimaklumi karena dalam masa pandemi *Covid – 19*. Untuk itu bukan hanya dari biaya operasional saja yang tidak efisien akan tetapi dalam pengoperasiannya juga kurang efektif, diketahui biaya penggajian personil saja sudah menghabiskan anggaran ± Rp. 1 milyar belum termasuk biaya operasional lainnya. Diharapkan dalam masa pasca pandemi *Covid – 19* yang terjadi, para pihak yang melakukan kebijakan kerjasama dapat melakukan sinergitas dalam melakukan perencanaan pengelolaan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai agar menjadi efektif dan efisien ke depannya.

Evaluasi Meta

Evaluasi meta yaitu penilaian terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi dilakukan tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, *culture*, dan lingkungan, apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang dipengaruhi pilihan – pilihan manajerial. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Perhubungan Kota Dumai dan PT. Pelita Air Service, maka pihak terkait kerjasama dalam hal ini Dinas Perhubungan dan PT. Pelita Air Service sudah melakukan tugas dan fungsinya masing – masing dalam melakukan beberapa proses evaluasi yang mana tentunya ini menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan Bandar Udara Pinang Kampai. Tetapi belum ada evaluasi bersama yang dilakukan antara pihak terkait terhadap kerjasama yang sedang berjalan, sehingga kekurangan – kekurangan yang ada bisa teratasi dan pengelolaan kedepannya bisa lebih maksimal dan berkesinambungan pada kebijakan kerjasama operasional pada Bandar Udara Pinang Kampai Dumai.

Namun sebaiknya sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Dumai maupun PT. Pelita Air Service memerlukan sebuah penilaian secara bersama yang bisa membantu untuk mengkoreksi apakah kebijakan yang telah diterapkan tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak atautkah ada hambatan yang menjadikan faktor terkendalanya kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan tentang evaluasi kebijakan Kerjasama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai yaitu pelaksanaan kebijakan Kerjasama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai belum maksimal jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan. Namun berdasarkan indikator evaluasi peneliti menyimpulkan sudah cocok karena sudah sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan yang ada pada Dinas Perhubungan itu sendiri yaitu meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan Daerah, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.

Kerjasama pengoperasian Bandar udara Pinang Kampai dapat untuk dipertahankan dengan syarat sarana prasarana, fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan harus di benahi sehingga menjadi efektif pengoperasiannya, atau alternatif lain aset Bandar Udara dihibahkan/ diserahkan kepada Pemerintah pusat/ daerah atau satu organisasi profesional yang khusus mengelola Bandar Udara. Namun apabila pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai selama ini tidak efisien dan tidak sesuai dengan harapan selama ini, dan juga tidak adanya kontribusi yang signifikan pada pendapatan asli daerah maka kerjasama pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai di Kota Dumai sebaiknya tidak diperpanjang lagi. Kebijakan memerlukan sebuah penilaian secara bersama dan menyeluruh yang bisa membantu untuk mengkoreksi apakah kebijakan yang telah diterapkan tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak atautkah ada hambatan yang menjadikan faktor terkendalanya kebijakan tersebut.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kerjasama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan terdapatnya beberapa petugas operasional Bandar Udara yang belum bersertifikasi. Selanjutnya Sarana prasarana Bandar Udara seperti *runway* masih belum

cukup panjang dan lebar serta belum didukung dengan fasilitas lainnya seperti *runway light*. Seluruh fasilitas tersebut wajib dibenahi agar pengoperasiannya menjadi maksimal dan dapat melayani pesawat berbadan besar (*wide body*), sehingga penerimaan dari jasa Bandar Udara jadi meningkat. Selain itu Dengan kondisi aset yang tetap dimiliki PT. Pertamina, untuk itu Pemerintah Kota Dumai terhukum dengan status aset tersebut untuk melakukan terkait rencana pengembangan sarana prasarana dan fasilitas Bandar Udara Pinang Kampai yang ada sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

SARAN

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai dan PT. Pelita Air Service perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai yang merupakan masih aset PT. Pertamina agar bisa berdaya guna sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan kedepannya Bandar Udara Pinang Kampai bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber penerimaan daerah dan selain itu bisa menjadi Bandar Udara alternatif selain Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
2. PT. Pertamina selaku pemilik aset melalui anak perusahaannya PT. Pelita Air Service diharapkan untuk dapat melakukan pengembangan dan merawat sarana prasarana Bandar Udara sehingga Bandar Udara Pinang Kampai dapat melayani pesawat berbadan besar (*wide body*) dan melayani banyak rute tujuan penerbangan yang mencakup kota – kota besar di Indonesia dan Internasional.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Dumai bersama – sama dengan instansi teknis terkait berupaya melakukan peninjauan dalam rangka penghibahan aset Bandar Udara dari PT. Pertamina kepada pemerintah pusat/ daerah agar pengelolaan Bandar Udara menjadi lebih optimal sehingga dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan dan perekonomian khususnya bagi Kota Dumai dan Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah
Keputusan Menteri Perhubungan No 39 Tahun 2019 Tentang Tata Nalanda Kebandarudaraan Nasional
- Anggara, Sahya, 2012, Ilmu Administrasi Negara, Graha Pustaka, Jakarta
Agustino ,Leo, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi, Alfabeta, Jakarta
B.Aji, Firman, 1990, Perencanaan Dan Evaluasi, Bumi Aksara, Jakarta
Budi,Winarno, 2007, Kebijakan Publik Teori Dan Proses, Media Perssindo, Yogyakarta
Dunn, William N. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Damin, Sudarwa, 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
Hamdi, Muchlis, 2015, Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Partisipasi, Ghalia Indonesia, Bogor
Hariyanto, Eri, 2017, evaluasi Kebijakan, Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN, Gava Media, Yogyakarta
Islamy, Irfan, 1994, Kebijakan Publik. Jakarta: Proyek Pelita
Irawan, Prasetya, 2006, Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, UI, Jakarta
Jones, Charles O. 1997, An Introduction To The Study Of Public Policy : Edisi ke 2. Duxbury Press, Masschusettes
Nurdin, Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Nasution. M.N. 2015, Manajemen Transportasi, Penerbit Ghalia Indonesia, cetakan pertama edisi keempat, Bogor
Kota Dumai Dalam Angka 2021

- Nurcholis, Hanif dkk, 2009, Perencanaan Partisipatif Pemda, PT Grasindo, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Roro, Mas Lilik Ekowati, 2015, Perencanaan Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program, Pustaka Cakra Surakarta, Surakarta
- Samodra, Wibawa dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Subarsono, 2010, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wirawan, 2016, Evaluasi : Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi Dan Profesi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widodo, Joko, 2018, Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik,Media Nusa Creative, malang